

**ANALISIS TINGKAT PENGUNGKAPAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Suatu Studi Eksploratif pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat)**

TESIS

Oleh :

SRI ADELLA FITRI

0821221016



PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ANDALAS

2010

**ANALISIS TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Suatu Studi Eksploratif pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat)**

Oleh :

SRI ADELLA FITRI

0821221016

Dibawah Bimbingan

(Dr. Yurniwati, SE, M.Si, Ak dan Firdaus, SE, M.Si, Ak)

RINGKASAN

Menurut PSAP No.1 Paragraf 21 menyatakan bahwa entitas pelaporan mengungkapkan informasi tentang ketaatan terhadap anggaran. Lebih lanjutnya pada paragraph 23 sampai 26 dijelaskan mengapa pentingnya mengungkapkan semua informasi, hal ini bertujuan agar menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan. Dengan demikian akan memperjelas bahwa Laporan Keuangan keuangan yang disajikan bukan hanya untuk memenuhi tuntutan atas peraturan yang ada, tapi harus memenuhi pengungkapan yang akan memudahkan bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami. Dalam kerangka konseptual juga dijelaskan bahwa salah satu prinsip akuntansi dalam pelaporan keuangan adalah prinsip pengungkapan lengkap dimana laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Sehingga pengungkapan yang tidak dapat disajikan dalam halaman depan laporan keuangan dapat disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Tentu hal ini akan memperjelas terhadap item-item yang diungkapkan.

Dengan menggunakan *content analysis*, maka pengkodean terhadap akun-akun dan informasi yang diungkapkan berdasarkan akun-akun dan informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Rata-rata tingkat pengungkapan informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah 43.71%, dengan tingkat pengungkapan yang tertinggi adalah 54% yaitu kabupaten pasaman barat, dan tingkat pengungkapan yang terendah adalah 33% yaitu kabupaten solok selatan. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat pengungkapan informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dimana nilai maksimal yang diharapkan adalah 100%. Rata-rata pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah cukup baik, rincian akunnya juga cukup baik tetapi belum adanya standar dan aturan lebih lanjut mengenai luasnya informasi dan rincian akun yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Untuk mengikuti perkembangan bisnis yang semakin kompleks, diperlukan keseimbangan informasi yang sesuai dan memadai. Menurut FASB didalam SFAC No.5 (1984, paragraf 13) dikatakan sesuai bila seperangkat laporan keuangan selama suatu periode harus menunjukkan *financial position at the end of the period, earning for the period, comprehensive income for the period, cash flow during the period, investment by end distributions to owners during the period*. Sedangkan memadai menunjukkan bahwa secara individual laporan keuangan akan mencakup *balancesheet* atau *statement of financial position, income statement, statement of retain earnings, statement of change in financial position (Statement of sources and application of funds)* (SFAC No.1 1978, paragraph 6). Karena itu pihak perusahaan harus bisa menentukan sistem dan prosedur akuntansi bisnisnya yang semakin berkembang dengan perkembangan kepentingan "stakeholders".

Menurut *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) No.1, tujuan pelaporan adalah untuk memberikan informasi bagi investor, calon investor, kreditor, calon kreditor dan para pemakai lainnya dalam membuat keputusan investasi, kredit dan keputusan lainnya secara rasional. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan sangat penting sebagai dasar untuk mengalokasikan dana-dana investasi secara efisien dan produktif. Daarough

(1993) dalam Subroto (2003) menunjukkan arti pentingnya informasi laporan keuangan dengan menyatakan bahwa, perusahaan-perusahaan memberikan laporan keuangan kepada berbagai *stakeholders*, dengan tujuan untuk memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu agar berguna dalam pengambilan keputusan investasi, monitoring, penghargaan kinerja dan pembuatan kontrak-kontrak. Kualitas keputusan investasi dipengaruhi oleh kualitas pengungkapan perusahaan yang diberikan melalui laporan tahunan. Agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami dan tidak menimbulkan salah interpretasi, maka penyajian laporan keuangan harus disertai dengan pengungkapan yang cukup (*adequate disclosure*). Selanjutnya informasi-informasi apa saja yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan masih menjadi perdebatan dikalangan ahli akuntansi, karena pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan sangat bervariasi dan masing-masing mempunyai kebutuhan informasi yang berbeda.

Di lingkungan pemerintahan, dengan bergulirnya UU Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU no.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan aturan pelaksanaannya , khususnya PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka terhitung tahun anggaran 2001, telah terjadi pembaharuan di dalam manajemen keuangan daerah. Dengan adanya otonomi ini, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Rata-rata tingkat pengungkapan informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah 43.71%, dengan tingkat pengungkapan yang tertinggi adalah 54% yaitu kabupaten pasaman barat, dan tingkat pengungkapan yang terendah adalah 33% yaitu kabupaten solok selatan. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat pengungkapan informasi dalam Laporan Keuangan, dimana nilai maksimal yang diharapkan adalah 100%.
- b. Rata-rata pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah cukup baik, rincian akunnya juga cukup baik tetapi belum adanya standar dan aturan lebih lanjut mengenai luasnya informasi dan rincian akun yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- c. Dari daerah sampel yang diteliti terlihat adanya ketidakseragaman dalam pengungkapan informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Adanya perbedaan atau ketidakseragaman dalam pengungkapan disebabkan belum adanya pengaturan lebih lanjut mengenai seberapa jauh

DAFTAR REFERENSI

- Afiah, Nunuy N. 2009. Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi 1. Kencana. Jakarta
- Bastari, Imam. 2004. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai Wujud Reformasi Manajemen Keuangan Daerah.
- Belkaouli, Ahmed R. 2000. Teori Akuntansi, Buku 1. Salemba Empat. Jakarta
- Cheng, Rita H. 1992. *An Empirical Analysis of Theories on Factor Influencing State Government Accounting Disclosure*. Journal Accounting and Public Policy
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006. *Telaah Kritis – PP No.24 Tahun 2005*, Terbitan Pertama, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, Jakarta.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006. *Runtuhnya Sistem Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Pertama, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
- Gallery, Natalie. 2006. *Discussion Of Daske and Gebhard: " International Financial Reporting Standards and Experts Perceptions of Disclosure Quality"*. Abacus 42 (3/4); pp 499-502
- Garnon and Meek. 2007. Akuntansi Perpektif Internasional, Edisi Terjemahan. Andi. Yogyakarta
- Giroux, Gary. 1987. *Political Interest and Governmental Accounting Disclosure*. Journal of Accounting and Public Policy
- Hassan, Mohamat S, dkk. 2007. *Determinants of Financial Instruments Disclosure Quality Among Listed Firms in Malaysia*
- Hendriksen, Eldon dan Vanbreda, M. 2002. Teori Akuntansi, Edisi Kelima, Buku 2. Terjemahan dari Herman Wibowo dari Accounting Theory. Interaksara. Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2004. Standar Akuntansi Keuangan. IAI
- Ikhsan, Muhammad P. 2009. Pengaruh Karakteristik Spesifik Perusahaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Real Estate Dan Properti Di Bursa Efek Indonesia. Tesis. Universitas Sumatera Utara